

LAPORAN BULANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU BULAN JULI 2026



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. Nomor 52 Palu, Kode Pos 94231

Telp. 0451 – 483385, 0811 4444 064 (CICA)

Website: ptunpalu.go.id

Email: ptunpalu@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	4
A. Sejarah Singkat.....	4
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Ruang Lingkup dan Sistematika Laporan	6
Bab II Tugas Pokok dan Fungsi	7
A. Manajemen Kesekretariatan	7
1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	7
1.1. Struktur Organisasi	7
1.2. Sumber Daya Manusia	9
1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun.....	11
1.4. Pengelolaan Database SIKEP	12
2. Umum dan Keuangan	13
2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan	13
2.1.1. Pengelolaan Persuratan.....	13
2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan	14
2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan Kepustakaan.....	14
2.2. Pengelolaan Aset dan BMN.....	14
2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan	14
2.2.2. Penetapan Status Penggunaan BMN	18
2.2.3. Penghapusan BMN	18
2.2.4. Pengalihan Status BMN.....	18
2.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara	18
2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	18
2.3.2. Laporan PNBPN	19
2.3.3. Data Persekot/Uang Muka Gaji	19
2.3.4. Ralat SPM.....	19

3.	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	20
3.1.	Revisi DIPA/POK.....	20
3.2.	Pengelolaan Website dan Jaringan.....	20
B.	Manajemen Kepaniteraan	20
1.	Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara	20
1.1.	Laporan Keadaan Perkara	21
1.2.	Laporan Jenis Perkara	22
1.3.	Laporan Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	22
2.	Laporan Pelaksanaan SIPP	22
3.	Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	22
4.	Pelayanan dan Posbakum	23
5.	Tata Kelola Arsip Perkara.....	24
C.	Hambatan dan Lain-lain.....	24
BAB III	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	25
A.	Kesimpulan.....	25
B.	Rekomendasi.....	25
LAMPIRAN.		26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. M. Soeharto.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Kelas I yang Berkedudukan di Kota Palu Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. Nomor 52 Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi:

1. Kota Palu
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Parigi Moutong
10. Kabupaten Poso
11. Kabupaten Tojo Una-Una
12. Kabupaten Sigi
13. Kabupaten Tolitoli

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diresmikan bersama-sama dengan PTUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi, dan PTUN Kendari secara Simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H. pada Tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan mulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak beroperasi pada Tahun 1998 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengalami pergantian Pimpinan sebanyak 15 (Lima belas) kali, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Jacob Gerungan, S.H. | (1998 s.d. 1999) |
| 2. Sutoyo, S.H. | (1999 s.d. 2001) |
| 3. Sulistyio, S.H. | (2001 s.d. 2002) |
| 4. Achmad Husein, S.H. | (2003 s.d. 2006) |
| 5. Dilmar Tatawi, S.H. | (2006 s.d. 2007) |
| 6. Kamer Togatorop, S.H., M.AP. | (2007 s.d. 2010) |
| 7. Nabari Sembiring, S.H. | (2010 s.d. 2011) |
| 8. H. Asmoro Budi Santoso, S.H. | (2011 s.d. 2012) |
| 9. H. Satibi Hidayat Umar, S.H. | (2012 s.d. 2015) |
| 10. Fari Rustandi, S.H., M.H. | (2015 s.d. 2020) |
| 11. Nur Akti, S.H. | (2020 s.d. 2022) |
| 12. Susilowati Siahaan, S.H., M.H. | (2022 s.d. 2023) |
| 13. Danan Priambada, S.H., M.H. | (2023 s.d. 2024) |
| 14. Rosidah, S.H, M.H | (2024 s.d. 2026) |
| 15. Oktova Primasari, S.H. | (2026 s.d. Sekarang) |

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Laporan Bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya Laporan Bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan Bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan Evaluasi dan Perbaikan.

C. Ruang Lingkup dan Sistematika Laporan

Ruang lingkup laporan ini meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama satu bulan periode pelaporan. Dalam hal ini terdiri dari, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Manajemen Kesekretariatan dan Manajemen Kepaniteraan, serta hambatan-hambatan, catatan tambahan, maupun hal-hal lain yang dianggap penting untuk dilaporkan. Kemudian Sistematika Laporan Bulanan ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, berisi Sejarah Singkat, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Laporan.
- BAB II Tugas Pokok dan Fungsi, berisi Manajemen Kesekretariatan, Manajemen Kepaniteraan, Hambatan dan Lain-lain.
- BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi.
- LAMPIRAN.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

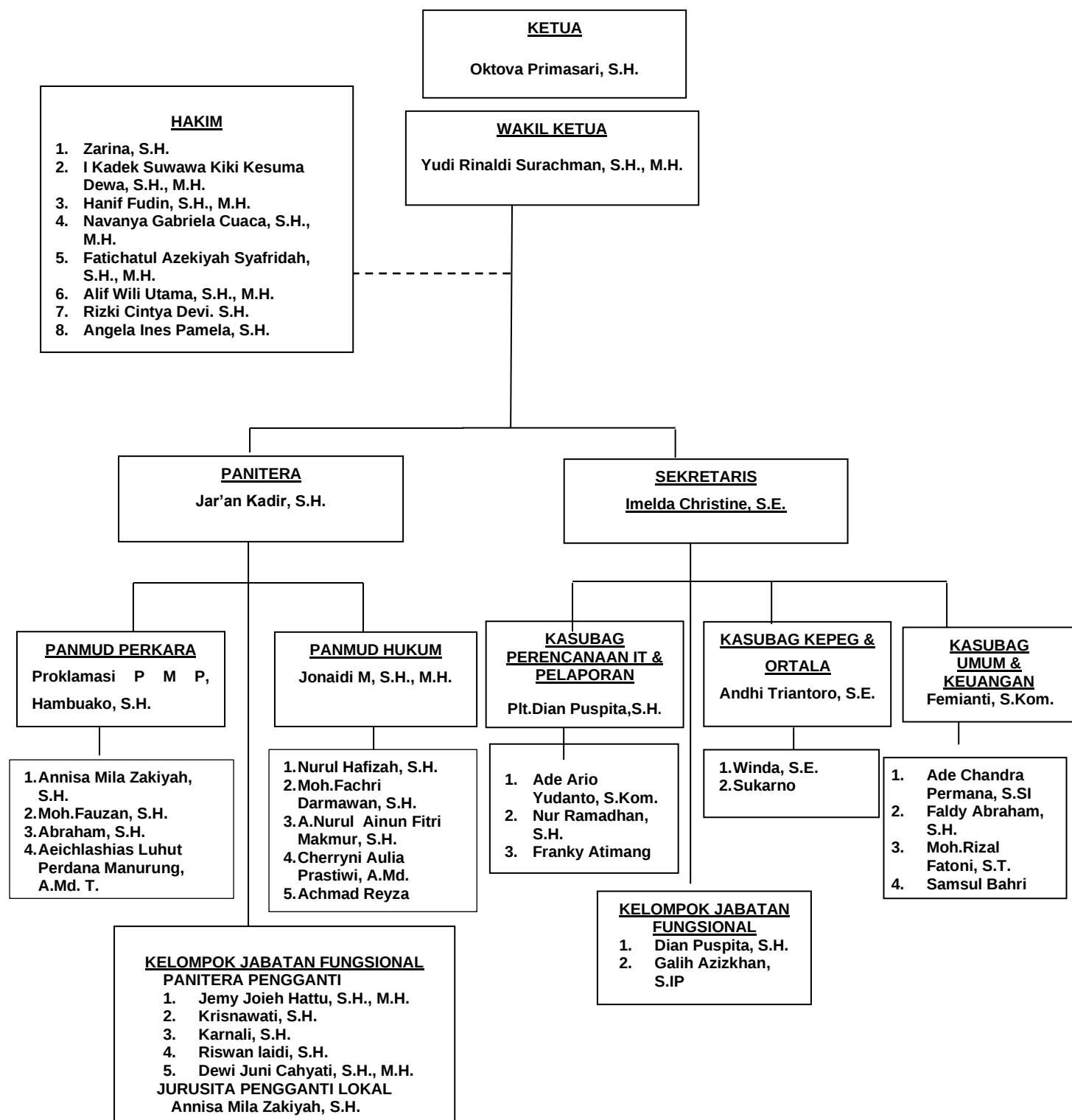
A. Manajemen Kesekretariatan

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Susunan Struktur Organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
STRUKTUR ORGANISASI
 (Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 jo
 Peraturan SEKMA RI Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2020)



1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, dan PPPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 8 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Perkara	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: 1 orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	: -
Fungsional SDM Ahli Pertama	: 1 orang
Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 5 orang
Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	: 1 orang
Klerek - Analis Perkara Peradilan	: 4 orang
Teknisi Sarana dan Prasarana	: 1 orang
Dokumentalis Hukum	: 2 orang
PPPK	: 11 orang

Sedangkan susunan personel Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Gol
1.	Ketua	Oktova Primasari, S.H.	IV/c
2.	Wakil Ketua	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	IV/b
3.	Hakim	Zarina, S.H.	IV/b
4.	Hakim	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	III/b
5.	Hakim	Hanif Fudin, S.H., M.H.	III/b
6.	Hakim	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	III/b
7.	Hakim	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H..	III/b

8.	Hakim	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	III/b
9.	Hakim	Rizki Cintia Devi, S.H.	III/b
10.	Hakim	Angela Ines Pamela, S.H.	III/b
11.	Panitera	Jar'an Kadir, S.H.	IV/a
12.	Sekretaris	Imelda Christine, S.E.	IV/a
13.	Panmud Hukum	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	IV/a
14.	Panmud Perkara	Proklamasi P.M.P Hambuako, S.H.	III/d
15.	Kasubbag Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom.	III/d
16.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Andhi Triantoro, S.E.	III/b
17.	Panitera Pengganti	Jemy Joieh Hattu, S.H., M.H.	III/d
18.	Panitera Pengganti	Krisnawati, S.H.	III/d
19.	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/c
20.	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/c
21.	Panitera Pengganti	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	III/b
22.	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Dian Puspita, S.H.	III/b
23.	Fungsional Analisis SDM Ahli Pertama	Galih Azizkhan, S.IP.	III/b
24.	Pengelola Sistem & Teknologi Informasi	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	III/a
25.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Annisa Mila Zakiya, S.H.	III/a
26.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Nurul Hafiza, S.H.	III/a
27.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	III/a

28.	Klerik - Analis Perkara Peradilan	Abraham, S.H.	III/a
29.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Moh Rizal Fatoni, S.T.	III/a
30.	Analisis Dokumentasi Hukum	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md. T.	II/c
31.	Analisis Dokumentasi Hukum	Cherryani Aulia Prastiwi, A.Md.	II/c
32.	Penata Layanan Operasional	Moh Fachri Darmawan, S.H.	IX
33.	Penata Layanan Operasional	Moh Fauzan, S.H.	IX
34.	Penata Layanan Operasional	Nur Ramadhan, S.H.	IX
35.	Penata Layanan Operasional	Winda, S.E.	IX
36.	Penata Layanan Operasional	Faldy Abraham, S.H.	IX
37.	Penata Layanan Operasional	Ulil Amri, S.E.	IX
38.	Penata Layanan Operasional	Ade Chandra Permana, S.Si.	IX
39.	Operator Layanan Operasional	Achmad Reyza	V
40.	Operator Layanan Operasional	Franky Atimang	V
41.	Operator Layanan Operasional	Sukarno	V
42.	Operator Layanan Operasional	Samsul Bahri	V

1.3. Promosi, Mutasi, dan Pensiun

Pejabat dan atau pegawai yang mendapat promosi atau mutasi adalah sebagai berikut:

Data Promosi dan Mutasi

No	Nama	Asal Mutasi	Mutasi
1	Rosidah, S.H., M.H.	PTUN PALU	PTUN SAMARINDA
2	Dedy Kurniawan, S.H.	PTUN PALU	PTUN SAMARINDA
3	Oktova Primasari, S.H.	PTUN JAMBI	PTUN PALU
4	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	PTUN BANDUNG	PTUN PALU
5	Andhi Triantoro, S.E.	PTUN KENDARI	PTUN PALU

Pejabat dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Memasuki Masa Pensiun

No	Nama	Masa Kerja	TMT Pensiun
1	Hj. Aminah, S.H.	34 tahun 4 bulan	1 juli 2026

1.4. Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Pemutakhiran database SIKEP dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi / mutasi / pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, pengelolaan database dilakukan oleh Saudara Galih Azizkhan, S.IP. sebagai User Administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Database SIKEP

No	Nama	Status
1.	Oktova Primasari, S.H.	Lengkap
2.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	Lengkap
3.	Zarina, S.H.	Lengkap
4.	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	Lengkap

5.	Hanif Fudin, S.H., M.H.	Lengkap
6.	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	Lengkap
7.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	Lengkap
8.	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	Lengkap
9.	Rizki Cintia Devi, S.H.	Lengkap
10.	Angela Ines Pamela, S.H.	Lengkap
11.	Jar'an Kadir, S.H.	Lengkap
12.	Imelda Christine, S.E.	Lengkap
13.	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	Lengkap
14.	Proklamasi P.M.P Hambuako, S.H.	Lengkap
15.	Femianti, S.Kom.	Lengkap
16.	Andhi Triantoro, S.E.	Lengkap
17.	Krisnawati, S.H.	Lengkap
18.	Jemy Joieh Hattu, S.H., M.H.	Lengkap
19.	Karnali, S.H.	Lengkap
20.	Riswan Laidi, S.H.	Lengkap
21.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Lengkap
22.	Galih Azizkhan, S.IP.	Lengkap
23.	Dian Puspita, S.H.	Lengkap
24.	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	Lengkap
25.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Lengkap
26.	Nurul Hafiza, S.H.	Lengkap
27.	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Lengkap
28.	Abraham, S.H.	Lengkap
29.	Moh Rizal Fatoni, S.T.	Lengkap
30.	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md. T.	Lengkap
31.	Cherryani Aulia Prastiwi, A.Md.	Lengkap
32.	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Lengkap
33.	Moh Fauzan, S.H.	Lengkap
34.	Nur Ramadhan, S.H.	Lengkap
35.	Winda, S.E.	Lengkap
36.	Faldy Abraham, S.H.	Lengkap

37.	Ulil Amri, S.E.	Lengkap
38.	Ade Chandra Permana, S.SI.	Lengkap
39.	Achmad Reyza	Lengkap
40.	Franky Atimang	Lengkap
41.	Sukarno	Lengkap
42.	Samsul Bahri	Lengkap

2. Umum dan Keuangan

2.1 Tata Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat masuk dan surat keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di Bagian Umum dan Keuangan. Data statistik surat masuk dan surat keluar periode Juli 2026:

No	Klasifikasi Surat	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
1	Ketua / Wakil ketua	61	101
2	Panitera	-	18
3	Sekretaris	12	69
	Jumlah	73	188

2.1.2 Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersimpan di Perpustakaan sampai dengan bulan Juli 2026 berjumlah (909) buah. Pengelolaan database Perpustakaan dicatat ke dalam Buku Register Pustaka. Pengelolaan database secara elektronik sudah dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**.

2.1.3 Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih sangat kurang. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada penyediaan ruangan khusus perpustakaan, berupa lemari buku. Sedangkan meja dan kursi petugas dan meja baca untuk pengunjung belum tersedia.

2.2 Pengelolaan Aset dan BMN

2.2.2 Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

1. Tanah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 3.250 m², Luas Gedung 2.281.63 m², terletak di Jalan Prof.Moh Yamin, SH. No 52 Palu, Sulawesi Tengah. Tanah Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 2.123 m² terletak di Jalan Kijang Raya Nomor 47 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan	Kondisi
1	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
2	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
3	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
4	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
5	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
6	Gol.1 C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
7	Gol.1 C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan
8	Gol.1 C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²	Rusak Ringan

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 A untuk Ketua sesuai Surat Keputusan Nomor: 66/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/II/2026;
- 2) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 B untuk Wakil Ketua sesuai Surat Keputusan Nomor: 65/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/II/2026;
- 3) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 E untuk Hakim a.n. Hanif Fudin, S.H. M.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 62/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/II/2026;
- 4) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 F untuk Hakim a.n. I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 61/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/II/2026;

- 5) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² untuk Nomor rumah 47 H untuk Hakim a.n. Alif wili Utama, S.H., M.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 59/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
 - 6) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 C untuk Hakim a.n. Angela Ines Pamela, S.H. sesuai Surat Keputusan Nomor: 64/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
 - 7) Rumah dinas type C luas bangunan:77 m² Nomor rumah 47 G untuk Sdr. Moh.Rizal Fatoni, S.T. sesuai Surat Keputusan Nomor: 60/SEK.PTUN.W4TUN2/PL1.2/I/2026;
 - 8) Rumah dinas type C luas bangunan:77m² Nomor rumah 47 D untuk Panitera sesuai Surat Keputusan Nomor: 63/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
3. Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri dari roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sudah dibuatkan Surat Keputusan Penggunaan Kendaraan Dinas.

Data kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Dinas Toyota Innova dengan Nomor Polisi DN 1185 A diperuntukan untuk Ketua dengan Nomor: 962/SEK.PTUN.W4-TUN2/SK.PL1.2/VII/2026;
- 2) Kendaraan Dinas Vios dengan Nomor Polisi DN 1051 SH sedang dalam proses penghapusan;
- 3) Kendaraan Dinas Toyota KF 80 dengan Nomor Polisi DN 1498 ST sedang dalam proses penghapusan;
- 4) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4819 A sedang dalam proses penghapusan;
- 5) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4821 A sedang dalam proses penghapusan;
- 6) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4438 A sedang dalam proses penghapusan;
- 7) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4437 A sedang dalam proses penghapusan;

- 8) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 4190 A sedang dalam proses penghapusan;
- 9) Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Nomor Polisi DN 6389 ST sedang dalam proses penghapusan;
- 10) Kendaraan Dinas Roda Dua Nomor Polisi DN 4820 A sedang dalam proses penghapusan;

Perlu adanya penambahan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 3 Unit diperuntukan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 8 Unit diperuntukan untuk Panmud Hukum, Panmud Perkara, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA, Kasubbag PTIP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Keuangan Perkara dan Jurusita Pengganti.

Kondisi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) berdasarkan Tahun dan Type Kendaraan sebagai berikut:

No	Type Kendaraan	Tahun	Kondisi	Pengguna
1	Toyota Innova G	2025	Baik	Ketua
2	Toyota Vios	2007	Rusak Berat	-
3	Toyota KF 80 I	2024	Rusak Berat	-
4	Honda NF 125 D	2006	Rusak Berat	-
5	Honda Glp III (Mega pro)	2006	Rusak Berat	-
6	Honda Supra 125 SFC	2007	Rusak Berat	-
7	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Rusak Berat	-
8	Honda Revo	2009	Rusak Berat	-
9	Honda Revo	2009	Rusak Berat	-
10	Honda Revo	2009	Rusak Berat	-

2.2.3 Penetapan Status Penggunaan BMN

Terdapat penetapan status penggunaan BMN pada bulan Juli Tahun 2026 (terlampir).

2.2.4 Penghapusan BMN

Tidak terdapat penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada bulan Juli 2026.

2.2.5 Pengalihan Status BMN

Tidak terdapat alih status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada bulan Juli Tahun 2026.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran **DIPA 005.01** Bulan Juli 2026

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Pegawai(51)	15.457.204.000,-	953.078.050,-	10.241.966.472,-	5.215.237.528,-
2	Barang(52)	1.822.619.000,-	163.585.787,-	915.679.380,-	906.939.620,-
3	Modal(53)	74.000.000,-	0,-	73.781.700,-	218.300,-

2.3.2 Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran **DIPA 005.05** Bulan Juli 2026

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Barang (52) Non Operasional	80.154.000,-	5.865.000,-	54.324.500,-	25.829.500,-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran:

2.3.2 Laporan PNB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Bulan Juli 2026 secara umum sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PNB

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bulan lalu	Bulan ini
1	425122	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan mesin	0,-	0,-

2	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,-	0,-
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0,-	0,-
4	425232	Uang Meja (Leges)	160.000,-	90.000,-
5	425233	Ongkos Perkara	390.000,-	370.000,-
6	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.169.500,-	959.000,-
7	425151	Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi	1.190.400,-	1.190.400,-
		Total	2.909.900,-	2.609.900,-

Laporan realisasi PNBPN secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.3.3 Data persekot/Uang Muka Gaji

Tidak ada Pegawai dan Hakim mengajukan persekot gaji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3.4 Ralat SPM

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak melakukan ralat SPM

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada Bulan Juli 2026 revisi ke **(6)** untuk DIPA **005.01**, dan revisi ke **(3)** untuk DIPA **005.05**.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

- Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP PTUN Palu menggunakan penyedia layanan Internet dari Telkom, dengan paket **Astinet Dedicated 25 Mbps dan Broadband 200 Mbps. Nomor: K.TEL.1097/HK.810/DR7-1A200000/2024 Tipe Permintaan layanan baru.**

- Kondisi jaringan Internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sampai saat ini sudah memadai. Untuk Penggunaan Layanan dan untuk Internet Back Up menggunakan Provider Star Link dan Telkom Indibiz.

B. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Juli 2026 sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dis missal
1	Gugatan	10	5	3	12	1	-	-	-
2	Banding	5	3	2	6	-	-	-	-
3	Kasasi	7	2	-	9	-	-	-	-
4	PK	4	-	2	2	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, periode Bulan Juli 2026 sebagai berikut:

Laporan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Masuk	Dicabut	Dis-missal	Perlawanan		Putusan				Sisa bulan ini
						Di-terima	Di-tolak	Cabut	Di-kabul kan	Dito lak	Tidak diterima	
1	Pertanahan	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	7
2	Kepegawaian	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Perizinan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	TENDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum /Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Total	10	5	-	-	-	-	1	-	-	2	12

1.3 Laporan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Laporan Jumlah Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, periode Bulan Juli 2026, yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Laporan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara yang mengajukan	Sisa Bln Lalu	Masuk Bulan Ini	Putus	Sisa Bln ini
1	Banding	5	3	2	6
2	Kasasi	7	2	-	9
3	Peninjauan Kembali	4	-	2	2
	Total	16	5	4	17

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah SIPP Versi 6.2.4, Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Juli 2026 adalah sebesar **75,00 % (data dari SIPP MA)**.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah memiliki sarana meja Informasi dan Pengaduan, dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan sudah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 620/KPTUN.W4-TUN2/SK.OT1.2.5/XI/2025, tanggal 12 November 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sarana lainnya adalah tersedianya buku register meja informasi, blangko-blangko permohonan. Untuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN sudah menggunakan aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).

Permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan Juli 2026 berjumlah Nihil.

Buku Register Informasi

No	Pemohon	Tgl diterima	Objek permohonan	Tindak Lanjut
1.	NIHIL	-	-	-

Jumlah pengaduan pada Bulan Juli 2026 yang telah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah **Nihil**.

Buku Register Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subjek	No. Register
1.	NIHIL	-	-	-

4. Pelayanan Posbakum

Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum, Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes.

Penerima Layanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lembar lampiran.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan Arsip Perkara dibedakan ke dalam Arsip Perkara yang masih aktif (Perkara yang masih dalam tahap Pemeriksaan), berada pada Kepaniteraan Muda Perkara, sedangkan Arsip Perkara in Aktif (Berkekuatan Hukum Tetap) dilimpahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum untuk selanjutnya diarsipkan di ruang Arsip Perkara.

C. Hambatan dan Lain-lain.

Salah satu hambatan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran. Kondisi ini meliputi keterbatasan jumlah maupun kondisi perangkat printer dan laptop yang digunakan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, ketersediaan kursi di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ruang Pemeriksaan Persiapan juga masih belum memadai untuk menunjang kenyamanan pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran proses persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan dan pembaruan sarana dan prasarana tersebut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, dan kenyamanan lingkungan kerja.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- 1) Bagian Kesekretariatan untuk tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik. dalam hal ini untuk bagian Perencanaan Teknologi Informasi sampai dengan Bulan Juli 2026, sudah melakukan Revisi untuk Tahun Anggaran 2026, yaitu revisi ke **(6)** untuk **DIPA 005.01.** dan revisi ke **(3)** untuk **DIPA 005.05.** Pada Bagian Umum dan Keuangan realisasi anggaran **DIPA 01** sebesar **64,72%**, dan **DIPA 05** sebesar **67,78%**.
- 2) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 2 (dua) unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sejumlah 7 (tujuh) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengalami rusak berat dan dalam Proses Penghapusan.
- 3) Adanya keterbatasan jumlah maupun kondisi perangkat printer dan laptop yang digunakan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 4) Belum tersedia kursi Majelis Hakim, Panitera dan Para Pihak serta sound system di Ruang Pemeriksaan Persiapan.

2. Rekomendasi

- 1) Bagian Kesekretariatan agar terus mempertahankan kinerja yang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Umum, dan Keuangan. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan revisi anggaran serta percepatan realisasi anggaran agar penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
- 2) Agar proses penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) unit yang mengalami rusak berat dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengusulkan pengadaan kendaraan dinas pengganti berdasarkan kebutuhan operasional kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Agar dilakukan pengadaan atau penggantian perangkat printer dan laptop sesuai kebutuhan pegawai dan standar sarana kerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta mendukung pelayanan kepada masyarakat.

- 4) Mengusulkan pengadaan kursi Majelis Hakim, Panitera, dan Para Pihak serta sound system pada Ruang Pemeriksaan Persiapan sesuai standar sarana dan prasarana peradilan, sehingga pelaksanaan pemeriksaan persiapan dapat berlangsung dengan tertib, nyaman, dan mendukung kelancaran proses persidangan.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALU,**

OKTOVA PRIMASARI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPN DIPA 005.05

Lampiran 4 : Penetapan Status Penggunaan BMN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.